

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Enny, 2022, Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers
- Amiruddin, dan Asikin Zainal, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- DINATA, D.F., 2022, Asas Hukum Acara pada Umumnya
- Haryadi, P., 2022, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata, Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2017, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika
- Hutagalung, S.M., 2022, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua, Sinar Grafika
- Meliala, D.S., 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia
- Meliala, D.S., 2015, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa Aulia
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia
- Pnh Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Kencana
- Prodjodikoro, W., 1984, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Sumur Bandung
- Rachamadi, Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: PT Itra Aditya Bakti
- Rahmadi, Takdir, 2011, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Press

- Simanjuntak, Pnh, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Kencana
- Soekanto, Soerjono, 1986, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian Hukum,
Jakarta: Grafindo Persada
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta
- Sugitario, E. dan Tirtamulia, T., 2012, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
Brilian Internasional
- Sudrajat, Tedi dan Wijaya, Endra, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan
Pemerintahan, Bumi Aksara
- Yahya Harahap, 2017, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

JURNAL

- Amanda, Y., dkk. (2025). Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam
Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(1.B), 273-
281.
- Amriani, N. (2005). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Anne M and Udo Kuckartz. (2002). "Qualitative Text Analysis with MAXQDA."
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi
Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif. AL MAQASHIDI, 4(2), 1-
16.
- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. Jurnal Ilmiah
Al-Syir'ah, 7(2).
- Buonsu, Dewi, dan Suryani. (2021). Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 68-72.

- Chandranegara, I.S. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 570.
- Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Dananjaya, P.B. dan Rahayu. (2022). Mekanisme Citizen Lawsuit dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 15-30.
- Dewi, N.M.T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 82.
- Enrico Simanjuntak. (2018). Perkara Advokasi Publik Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol IV (1), 20.
- Gusman, D., Rosari, A., dan Pratama. (2021). Perlindungan Warga Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Riau Law Journal*, 5(2), 161-178.
- Gunawan, A. (2019). Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1).
- Koraag, S. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 9(7).
- Khoiriyyah. (2022). Studi Analisis Tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(6), 776-785.
- Kesuma, D.A. (2023). Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 49-51.

- Mantili, R., dan Sutanto, S. (2019). Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata Di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 10(2), 1-18.
- Mario Julyano Panggabean, dkk. (2021). Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. *Diponegoro Law Journal*, Vol 10 (2), 378-379.
- Marjo, 2016. Tinjauan Tentang Mediasi Di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Laporan Penelitian Universitas Diponegoro.
- Martini, M. (2024). Konstruksi Peraturan Pasca Pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 158-174.
- Mirzaqon and Budi Purwoko. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1), 187.
- Mumek, R.A. (2017). Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 5(2).
- Manullang, S.O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(3), 353-373.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Sage Publications.
- Namang, R.B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2).

- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 906-926.
- Naviah, F. (2013). Penerapan mekanisme gugatan citizen lawsuit dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Verstek*, 1(3).
- Paat, Y.L. (2013). Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*, 1(3).
- Panjaitan, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2).
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 207-220.
- Rumokoy, N.K. (2012). Peran P. TUN dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(2), 126-139.
- Safitri dan Sa'adah. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.
- Solissa, F.R., Salmon, H., dan Lakburlawal, M.A. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 1-10.
- Taluke, Asdian. (2013). Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. *Lex Privatum*, 1(4).
- Utama. (2015). Surat keputusan tata usaha negara yang bersifat fiktif positif. *Notarius*, 8(2), 141-251.
- Yanti, H. (2017). Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(1), 75-93.

ARTIKEL

Muhammad Yasin. (2021). “Citizen Lawsuit, Gugatan Non-Ganti Rugi yang Sudah

Sering Digunakan”. Artikel Hukum Online, 6 Juli 2021. Diakses pada 30

Oktober 2024,

[https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e2ff50e4f78/citizen-](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e2ff50e4f78/citizen-lawsuit--gugatan-non-ganti-rugi-yang-sudah-sering-digunakan)

[lawsuit--gugatan-non-ganti-rugi-yang-sudah-sering-digunakan.](https://www.hukumonline.com/stories/article/lt60e2ff50e4f78/citizen-lawsuit--gugatan-non-ganti-rugi-yang-sudah-sering-digunakan)

Prosedur Mengajukan Perkara di Pengadilan Tingkat I. Diakses pada 21 Januari 2025,

[https://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-](https://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i)

[prosedur-berperkara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i.](https://pa-sidikalang.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/21-prosedur-pengajuan-perkara-tingkat-i)

Tahapan Persidangan. Diakses pada 21 Januari 2025, [https://pa-](https://pa-tilamuta.go.id/layanan-hukum/tahapan-persidangan)

[tilamuta.go.id/layanan-hukum/tahapan-persidangan.](https://pa-tilamuta.go.id/layanan-hukum/tahapan-persidangan)

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta

Perubahannya;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta

perubahannya;

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

Herzien Indonesisch Reglement / HIR

Rechtreglement voor de Buitengewesten /RBg

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

WAWANCARA

Advokat, *Wawancara*, Robby Fariz Law Firm, (Bandar Lampung, 15 Februari 2025).

Mashuri Effendi, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (Jakarta, 24 Januari 2025).

Advokat, *Wawancara*, TDA & Partners, (Jakarta, 12 Februari 2025).

Guse Prayudi, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, (Jakarta, 5 Februari 2025).

Rizky Mubarak, *Wawancara*, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, (Jakarta, 24 Februari 2025).